

ABSTRAK

Seiring dengan bergulirnya globalisasi di era otonomi daerah, sebagai dampak dari revolusi teknologi komunikasi dan transportasi, keterlibatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat. Salah satu aktor yang semakin aktif kehadirannya dalam arena internasional adalah pemerintah lokal (*local government*). Salah satunya adalah Provinsi DIY. Pemerintah Provinsi DIY sampai dengan tahun 2009 telah melakukan kerjasama dengan 13 Provinsi/lembaga pada 7 negara di luar negeri yang dilaksanakan oleh BKPM DIY. Salah satu jalinan kerjasama tersebut dengan Kyoto Jepang. Peneliti dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: “Bagaimana peran Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kerjasama luar negeri dalam bentuk *Sister Province* dengan Kyoto Prefecture Jepang?” Setelah dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, diperoleh hasil bahwa Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kerjasama *Sister Province* antara Pemerintah Daerah Provinsi DIY dengan Kyoto Jepang menjalankan fungsi-fungsi manajemen serta bertindak sebagai *Public Relations* Internasional, dengan cara mengkomunikasikan kepentingan dan tujuan pemerintah daerah masing-masing dalam kerjasama *Sister Province* tersebut. Selanjutnya, implementasi Peran Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kerjasama luar negeri dalam bentuk *Sister Province* dengan Kyoto Prefecture Jepang yaitu sebagai koordinator, inisiator, informator, mediator, promotor, fasilitator, protektor, dan konsultan/supervisor. Melalui peran-peran tersebut BKPM DIY menjadikan dirinya *Public Relations* Internasional yang berfungsi sebagai bagian penting penganalisis situasi, memiliki peran yang intens dalam pengembangan prosedur, kebijakan, produk dan aksi perusahaan. Juga memiliki *power* mengubah sesuatu yang seharusnya diubah dan terlibat dalam segala bentuk perubahan organisasi. Selanjutnya, menjadi paham spirit setiap program baik motivasi maupun tujuan mengapa program harus dilaksanakan, mensupport perubahan strategis organisasi, keputusan yang sifatnya taktis dan memiliki komitmen pada perubahan dan mampu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan program. Selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama *Sister Province* antara Pemerintah Daerah Provinsi DIY dengan Kyoto Jepang, meliputi komunikasi, dalam hal ini adalah kendala bahasa, tahun anggaran yang berbeda: Jepang diawali pada bulan Januari, sedangkan Indonesia pada bulan April, serta Kendala Hukum utamanya dalam menentukan format perjanjian antara kedua daerah yang masing-masing tunduk pada hukum negaranya masing-masing di tingkat pusat.

Kata Kunci: komunikasi, implementasi peran, *sister province*.